

Ringkasan Eksekutif: Pilihan sulit



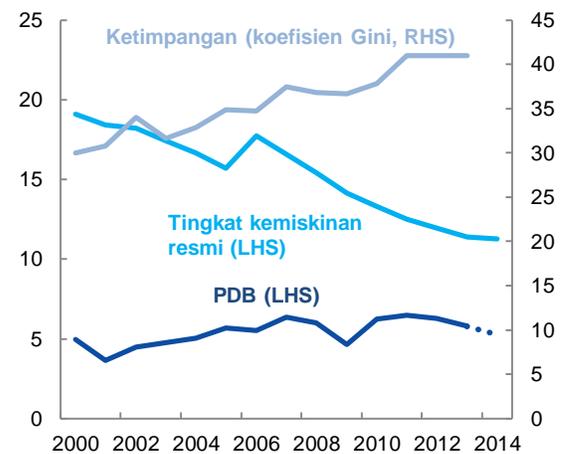
Indonesia, demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah memilih Presiden baru ...

... yang pada awal jabatannya akan langsung dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam upaya mengatasi peningkatan tekanan fiskal, dan melaksanakan reformasi yang mendesak guna mewujudkan potensi ekonomi yang besar

Warga negara Indonesia memberikan suaranya bagi Presiden mereka berikutnya pada tanggal 9 Juli. Hasil resmi pemilu akan diumumkan pada tanggal 22 Juli, dan kini Indonesia tengah menanti pelantikan Presiden baru pada bulan Oktober.

Indonesia saat ini menghadapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Pertumbuhan yang kokoh selama dekade lalu telah mendorong kemajuan pembangunan yang nyata. Indonesia kini merupakan negara nomor sepuluh terbesar dunia dalam paritas daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity – adjusted*), menurut angka terakhir. Namun risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini dapat meningkat. Dengan perlambatan pertumbuhan penerimaan dan peningkatan belanja subsidi energi, hal ini akan semakin membatasi pengeluaran yang penting untuk pembangunan, seperti infrastruktur, jaminan sosial, dan kesehatan. Seperti disoroti pada laporan Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia tahun 2014 dari Bank Dunia (dengan judul Indonesia: Menghindari Perangkap), para penentu kebijakan perlu mengambil pilihan-pilihan yang sulit terkait reformasi kebijakan dan investasi yang mendesak dibutuhkan, serta

Gambar 1: Diperlukan penguatan kembali pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan Indonesia, dan mengatasi ketimpangan
(persen perubahan (tingkat kemiskinan dan PDB), skala 0-100 (Gini))



Catatan: Tingkat kemiskinan adalah perkiraan BPS Maret; PDB 2014: Proyeksi Bank Dunia; data Gini hingga 2012
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

menindaklanjutinya dengan pelaksanaan, guna mendorong tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan, membalikkan perlambatan laju pengentasan kemiskinan (Gambar 1), dan memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebutuhan akan reformasi sebagian mencerminkan perubahan lingkungan ekonomi global; pilihan-pilihan sulit untuk memetik manfaat dari peningkatan permintaan dunia dan menyesuaikan diri terhadap terus melemahnya harga komoditas utama Indonesia...

Pemerintah yang baru akan menghadapi lingkungan global yang terus berubah, seiring dengan meredanya faktor-faktor pendorong selama dekade lalu, yaitu peningkatan harga komoditas dan permintaan dan rendahnya biaya pendanaan global. Namun, dalam jangka pendek, laju ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat, setelah mencatat permulaan tahun yang lebih lambat dari perkiraan. Sebagian besar percepatan tersebut akan dimotori oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama AS dan Eropa. Lebih kuatnya pertumbuhan di negara-negara maju akan meningkatkan permintaan bagi produk-produk ekspor dari negara-negara berkembang, sesuai dengan daya saing negara-negara berkembang tersebut di pasar dunia. Sementara sejauh ini kondisi keuangan dunia telah membaik pada tahun ini, dengan penundaan pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun berlanjutnya penurunan harga-harga komoditas akan menurunkan pendapatan dan penerimaan negara-negara eksportir komoditas seperti Indonesia. Harga enam komoditas utama Indonesia, yang merupakan 50 persen dari seluruh pendapatan ekspor, terus melemah dengan penurunan tercatat sebesar 8,6 persen pada tahun 2014 hingga bulan Juni, yang dimotori oleh batubara (turun sebesar 15,2 persen). Volatilitas harga minyak yang belakangan terjadi, sebagian akibat gejolak yang terjadi di Irak, menyoroiti kerentanan berkelanjutan posisi fiskal Indonesia terhadap peningkatan harga minyak internasional.

...dan memastikan bahwa berlanjutnya moderasi siklikal pertumbuhan dalam negeri tidak menjadi struktural

Pertumbuhan PDB riil Indonesia mengalami moderasi menjadi 5,2 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*) dan 4,3 persen kuartal-ke-kuartal (*quarter-on-quarter, qoq*) dengan penyesuaian musiman tahunan (*quarter-on-quarter at a seasonally-adjusted annualized rate, qoq saar*) pada kuartal pembuka tahun 2014. Namun berbeda tajam dengan kuartal akhir tahun 2013, ketika kegiatan ekonomi mencatat dorongan yang signifikan dari ekspor bersih, permintaan dalam negeri tetap kuat pada kuartal pertama 2014 sementara kontribusi perdagangan bersih terhadap pertumbuhan mencatat nilai negatif. Konsumsi sementara yang terkait dengan belanja pemilu mungkin berperan dalam mendorong permintaan dalam negeri pada kuartal pertama, bersama-sama dengan tetap kuatnya investasi bidang konstruksi. Seperti disinggung di bawah, perkiraan dasar (*baseline*) Bank Dunia tetap pada percepatan kembali pertumbuhan ekonomi yang moderat hingga tahun 2015. Namun tanpa disertai tambahan langkah-langkah kebijakan dan pertumbuhan produktivitas, maka risiko-risiko penurunan yang lebih struktural akan semakin meningkat.

Defisit neraca berjalan yang stabil pada kuartal pertama telah menyamakan tantangan-tantangan terhadap proses penyesuaian eksternal

Defisit neraca berjalan secara keseluruhan bersifat stabil, yaitu di tingkat 2,1 persen dari PDB, pada kuartal pertama tahun 2014. Namun proses penyesuaian luar negeri Indonesia tampaknya mulai melambat. Larangan ekspor sebagian mineral, yang berlaku mulai bulan Januari, menyebabkan penurunan volume ekspor yang signifikan. Hal ini, bersama-sama dengan melemahnya harga komoditas dunia, telah menekan penerimaan ekspor, dan terbukti menjadi beban berkelanjutan bagi keseluruhan neraca berjalan. Pelebaran yang baru dan bersifat musiman pada saldo neraca berjalan diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Pembiayaan luar negeri sejauh ini mencatat nilai yang cukup besar pada tahun 2014, dengan aliran masuk modal portofolio ke Indonesia (serta ke ekonomi-ekonomi berkembang lainnya) berkat berlanjutnya kondisi moneter akomodatif di ekonomi-ekonomi negara maju dan pemulihan selera risiko (*risk appetite*) global, yang mendorong kepemilikan surat utang negara oleh pihak asing ke tingkat yang belum pernah tercatat sebelumnya.

Harga-harga aset Indonesia telah meningkat, namun kondisi kredit perbankan terus mengetat

Harga aset-aset Indonesia secara umum telah meningkat selama tahun 2014 dan hampir pulih dari penurunan yang terjadi pada paruh kedua tahun lalu, sebagian berkat peningkatan aliran modal asing. Namun likuiditas bank dalam mata uang lokal tetap ketat dan tampaknya akan semakin menekan pertumbuhan kredit. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah dapat berpengaruh terhadap semakin lemahnya pertumbuhan kredit. Pada saat yang sama, ekspektasi pertumbuhan yang lebih rendah dapat semakin mendorong pelemahan permintaan kredit lebih lanjut.

Perkiraan Bank Dunia terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 2014 direvisi sedikit, turun ke 5,2 persen

Melihat kedepan, lebih rendahnya konsumsi pemerintah dari yang diperkirakan sebelumnya (seiring dengan perubahan APBN 2014), lebih lambat pertumbuhan kredit, dan berlanjutnya perlemahan pertumbuhan pendapatan terkait dengan komoditas, tampaknya akan menghambat pertumbuhan PDB pada paruh kedua tahun 2014. Pada kasus dasar (*base case*), Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB riil sebesar 5,2 persen untuk tahun 2014, hanya revisi kecil sebesar 0,1 poin persentase dari perkiraan pada **Triwulanan** edisi bulan Maret 2014. Perubahan prospek jangka pendek ini umumnya mencerminkan data perdagangan kuartal pertama yang lebih rendah dari perkiraan. Sementara penyesuaian ekonomi terhadap kondisi perdagangan yang lebih lemah dan prospek lebih tingginya suku bunga dunia masih terus berjalan. Tekanan yang berasal dari luar negeri dapat timbul kembali karena tidak adanya peningkatan yang nyata dalam kinerja ekspor, atau karena lebih lemahnya aliran masuk modal luar negeri, bila selera risiko dunia berbalik arah. Tekanan lebih lanjut terhadap pertumbuhan dapat terjadi akibat peningkatan penyusutan kredit, jika hal ini mengakibatkan perlemahan lebih lanjut dalam harga properti, dan pada akhirnya mengurangi kegiatan konstruksi riil.

Tabel 1: Menurut skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan pada 5,2 persen untuk tahun 2014

		2012	2013	2014p	2015p
PDB riil	(% perubahan tahunan)	6,2	5,8	5,2	5,6
Indeks harga konsumen	(% perubahan tahunan)	4,3	6,9	5,8	4,9
Saldo neraca berjalan	(Persen dari PDB)	-2,8	-3,3	-2,9	-2,4
Saldo anggaran (APBN)*	(Persen dari PDB)	-1,9	-2,2	-2,4	n,a,
PDB mitra dagang utama	(% perubahan tahunan)	3,4	3,5	4,0	3,9

Catatan: * Angka dari pemerintah – realisasi (2012-2013) dan angka APBN-P 2014
Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

APBN-P 2014 telah disetujui di tengah peningkatan tekanan fiskal, yang mengakibatkan peningkatan defisit fiskal dan kebutuhan pembiayaan bruto

Menanggapi perubahan ekonomi makro, penurunan pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan biaya subsidi energi, Pemerintah mengusulkan perubahan yang substansial terhadap APBN 2014. Defisit pada APBN-P yang disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Juni mencapai 2,4 persen dari PDB, meningkat dari 1,7 persen pada APBN sebelumnya. Pemotongan anggaran yang signifikan sebesar Rp 43 triliun bagi kementerian disetujui, bersama-sama dengan penundaan pembayaran tunggakan subsidi energi yang kian meningkat ke tahun 2015 sekitar Rp 50 triliun. Walau pergerakan lebih lanjut dalam reformasi subsidi BBM yang sensitif secara politis masih dinantikan, Pemerintah telah mengumumkan penyesuaian tarif listrik yang penting. Namun, walau dengan langkah-langkah penghematan biaya yang telah diumumkan, proyeksi ekonomi makro Bank Dunia menunjukkan defisit fiskal yang lebih besar, pada kisaran 2,8 persen dari PDB. Tingkat ini akan mendekati batas legal PDB sebesar 3 persen, dan masih tetap rentan terhadap peningkatan lebih lanjut dalam harga minyak atau perlemahan kurs Rupiah. Karenanya, kebutuhan peningkatan lanjutan dalam kualitas belanja dan peningkatan mobilisasi pendapatan menjadi sangat penting, bila Indonesia hendak mencapai prioritas-prioritas pembangunannya. Kemajuan dalam bidang ini akan sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan investor, membantu memastikan bahwa tambahan kebutuhan pembiayaan bersih Pemerintah sebesar 0,7 persen dari PDB akan terpenuhi secara memadai pada paruh kedua tahun 2014.

Salah satu prioritas yang penting bagi reformasi kebijakan fiskal adalah mendukung inklusivitas pertumbuhan masa depan, memitigasi tren peningkatan ketimpangan yang tampak di Indonesia

Indonesia mencatat kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan selama dekade lalu. Namun dengan perlambatan laju pengentasan kemiskinan, serta pesatnya peningkatan kekayaan, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin telah melebar. Pada tahun 2002, rata-rata konsumsi per orang dari 10 persen rumah tangga paling kaya adalah 6,6 kali lipat dibanding 10 persen rumah tangga yang paling miskin; pada tahun 2013, perbandingan ini telah meningkat menjadi 10,3 kali. Hal ini cukup mengkhawatirkan, pertama, karena peningkatan ketimpangan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang baik, dan, karenanya, membatasi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang tengah berlangsung. Kedua, hal ini meningkatkan keprihatinan akan kesetaraan, karena seluruh penduduk Indonesia seyogyanya memiliki akses terhadap kesempatan yang sama. Ketiga, peningkatan ketimpangan dapat membawa risiko-risiko bagi

belakangan ini

pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial pada masa depan. Melalui tindakan terpadu, Indonesia dapat menghambat peningkatan ketimpangan, termasuk dengan kebijakan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya akan memberantas ketimpangan, namun juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja.

Kondisi El Niño dapat memperburuk “musim” kebakaran hutan yang akan datang – menambah , tantangan awal bagi Pemerintahan baru, dan membutuhkan rencana penanggulangan yang sesuai

Menjaga hasil-hasil pencapaian dalam kemajuan pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial di Indonesia membutuhkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko-risiko bencana dan peningkatan ketahanan. Edisi *Triwulanan* ini meninjau salah satu risiko bencana ini: kebakaran lahan dan hutan. Walau Indonesia telah lama mengalami kebakaran-kebakaran tersebut, kebakaran lahan dan hutan semakin sering terjadi dan berskala besar dalam beberapa dekade belakangan, mencerminkan keterkaitan yang rumit antara faktor-faktor alam dan perbuatan manusia. Sebagai contoh, kebakaran yang sangat merusak pada bulan Februari-Maret 2014 mengakibatkan kerusakan dan kerugian lingkungan dan ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai 935 juta dolar AS hanya untuk provinsi Riau saja. Besarnya kemungkinan terjadinya kondisi El Niño menjelang akhir tahun 2014 turut meningkatkan risiko bahwa musim kebakaran berikutnya akan lebih merusak, suatu tantangan besar yang mendesak bagi Pemerintahan baru. Langkah-langkah seperti penerapan pendekatan yang sistematis untuk menentukan waktu mulainya musim kebakaran dan penetapan status siaga bahaya dapat menjadi hal yang penting dalam upaya memitigasi risiko ini.